

KEPENTINGAN NASIONAL TIONGKOK BERGABUNG DALAM *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP (RCEP) PERIODE 2015-2020*

Teguh Waluyo¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

This thesis aims to analyze China's interests in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) during the 2015–2020 period. RCEP is the largest trade and economic cooperation agreement, encompassing nearly 30% of the world's population. It serves as a milestone in the resurgence of trade liberalization, influencing the economic growth of its member countries, particularly China. This study employs a qualitative method, utilizing both primary and secondary data sources. The research is guided by the question: "Why does China have an interest in the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) during the 2015–2020 period?" This question is addressed and analyzed using the concepts of national interest and regional cooperation to examine China's involvement in RCEP. The study finds that China's participation in RCEP is a strategic move to fulfill its national interests. It provides an opportunity for China to expand its influence in the Asia-Pacific region and improve its political and economic relations with member countries, especially those with whom it has had strained relations. Additionally, this economic cooperation enhances market access, not only strengthening China's external trade environment but also driving new economic growth by boosting its domestic industries and businesses.

Keywords: China, RCEP, National Interest, Regional Cooperation

ABSTRAK

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kepentingan Tiongkok dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) periode 2015-2020. RCEP merupakan kerja sama perdagangan dan ekonomi terbesar dengan total populasi hampir 30% populasi dunia, menjadi tonggak untuk kebangkitan liberalisasi perdagangan yang memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi negara anggota khususnya Tiongkok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan penelitian ini, terdapat pertanyaan penelitian yaitu "Mengapa Tiongkok memiliki kepentingan dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) periode 2015-2020?", kemudian dijawab dan dianalisis menggunakan konsep kepentingan nasional dan kerja sama regional dalam menganalisis kepentingan Tiongkok dalam kerja sama RCEP. Penelitian ini menemukan bahwasanya, dengan bergabungnya Tiongkok dalam kerja sama RCEP merupakan strategi Tiongkok untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga, membuka peluang

untuk Tiongkok dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik serta memperbaiki hubungan politik ekonomi dengan negara anggota, khususnya terhadap negara yang dianggap memiliki hubungan kurang baik dengan Tiongkok. Selain itu, dalam kerja sama ekonomi ini, juga memberikan peningkatan dan perluasan akses pasar yang mana bukan hanya meningkatkan lingkungan perdagangan eksternalnya saja, tetapi juga memberikan dorongan terhadap pertumbuhan baru bagi ekonomi Tiongkok, salah satunya dalam meningkatkan industri dan bisnis domestiknya.

Kata Kunci : Tiongkok, RCEP, Kepentingan Nasional, Kerja sama Regional

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan membahas mengenai kepentingan Tiongkok dalam kemitraan ekonomi komprehensif regional atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) periode 2015-2020. Peristiwa ini menarik untuk diteliti, karena memperlihatkan hubungan kerja sama ekonomi yang dilakukan Tiongkok guna memenuhi kepentingan nasionalnya. Kerja sama ekonomi merupakan elemen penting dalam hubungan internasional dan perkembangan ekonomi dunia. Sehingga dapat menjadi peluang besar bagi negara-negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan perdagangannya melalui kerja sama. Kerja sama tersebut akan dibentuk melalui kesepakatan atau perjanjian ekonomi, yang mana salah satunya adalah perjanjian perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA), merupakan kesepakatan atau perjanjian kerja sama antar negara atau kawasan, yang dilatarbelakangi sebagai kelanjutan liberalisasi perdagangan internasional (Ragimun, 2018).

Sejak 1990-an, ekonomi global didominasi oleh Uni Eropa dan *North American Free Trade Area* (NAFTA). Namun, krisis keuangan 2008 menyebabkan perubahan besar, mendorong terbentuknya berbagai kerja sama ekonomi baru, termasuk *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) (Park, 2017). Perjanjian ini merupakan inisiatif *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) bersama enam negara mitra Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, India, dan Tiongkok dalam kerangka perdagangan bebas. RCEP menjadi perjanjian "mega regional" kedua di Asia-Pasifik setelah *Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership* (CPTPP) yang mulai berlaku pada 2018 (Petri & Plummer, 2020).

Negosiasi RCEP ini pertama kali diresmikan pada 2012 di Phnom Penh, Kamboja dengan mengesahkan prinsip-prinsip dan tujuan perundingan yang mana dimulai pada awal 2013 (Yudono, Dwi A, & Setiawan, 2020). Dengan total putaran sebanyak 28

perundingan reguler, tiga kali pertemuan KTT dan 13 kali pertemuan tingkat menteri. RCEP merupakan cakupan kerja sama berada di bawah persetujuan *World Trade Organization* (WTO) dan *General Agreement On Tariffs and Trade* (GATT) sehingga diharapkan menjadi kerja sama ekonomi kawasan baru yang memberikan dampak positif bagi negara anggota maupun global. RCEP dipandang sebagai penyeimbang *Trans Pacific Partnership* (TPP), yang merupakan bagian dari kebijakan AS di Asia Pasifik. RCEP menjadi alternatif bagi negara yang tidak tergabung dalam TPP, termasuk Tiongkok. Dengan bergabung dalam RCEP, Tiongkok berharap dapat menyeimbangkan kawasan serta memenuhi kepentingan nasionalnya (Park, 2017).

Sebagai ekonomi terbesar di Asia Pasifik dan kekuatan ekonomi kedua di dunia, Tiongkok mengalami pertumbuhan pesat sejak menerapkan reformasi pasar bebas pada 1979, Tiongkok telah menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dengan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tahunan rata-rata mencapai 9,5% pada 2018, dan dianggap sebagai “ekspansi berkelanjutan tercepat oleh ekonomi utama dalam sejarah (CRS Report, 2019). Dengan GDP mencapai USD 17,45 triliun, Tiongkok menjadi kekuatan yang diperhitungkan dan memanfaatkan posisinya untuk memperkuat hubungan dagang di kawasan. *International Monetary Fund* (IMF) mencatat bahwa Tiongkok adalah mitra dagang utama bagi 14 dari 15 anggota RCEP (Fadli, 2017). Selama negosiasi RCEP, Tiongkok berperan aktif dalam mendorong percepatan kesepakatan dan mengakui pentingnya RCEP bagi pertumbuhan ekonominya. Pada 15 November 2020, perjanjian RCEP pada KTT RCEP ke-4 resmi ditandatangani, menjadikannya perjanjian perdagangan bebas terbesar (Jiang & Yu, *Understanding RCEP and CPTPP : From the Perspective Tiongkok’s Dual Circulation Economic Strategy* , 2021). Dengan keterlibatan dan minat yang besar terhadap RCEP, jelas tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat beberapa kepentingan Tiongkok dalam melakukan sebuah kerja sama di dalamnya. Berbagai tindakan Tiongkok dalam menginisiasi juga menjadikan bentuk bahwasanya Tiongkok memiliki motif dan kepentingan yang besar dalam RCEP. RCEP sendiri dianggap sebagai mitra yang sangat penting bagi Tiongkok, dibuktikan dengan sikap Tiongkok yang menyambut baik kesepakatan ini karena memperkuat posisinya dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan regional di Asia Pasifik.

KERANGKA ANALITIK

Konsep Kepentingan Nasional

Penelitian ini akan menggunakan konsep yang sesuai dalam menganalisa kepentingan Tiongkok terhadap RCEP pada tahun 2015-2020. Dalam penelitian ini ini akan berfokus kepada kepentingan politik dan ekonomi, di mana suatu negara mengambil kebijakan ataupun kerja sama guna untuk meningkatkan keuntungannya sehingga dapat memenuhi kepentingan nasionalnya. Begitu juga dengan kepentingan politik, di mana negara akan menciptakan hubungan yang baik serta kepentingan untuk menjaga kedaulatan dan wilayah teritorial dari pihak luar sehingga menciptakan pengaruh yang kuat di dalamnya.

Seperti yang dijelaskan oleh Scott Burchill menyatakan bahwa kepentingan nasional memiliki pandangan optimis dan positif, meskipun tetap mempertahankan aspek kompetisi dalam hubungan internasional (Burchill, 2005). Namun, kompetisi tersebut lebih cenderung menghasilkan kerja sama daripada konflik. Dalam kepentingan nasional, terdapat tiga aspek utama:

1. Kepentingan politik – Negara berupaya memperluas kerja sama politik di tingkat global, yang didorong oleh globalisasi dan dinamika politik internasional.
2. Kepentingan ekonomi – Negara berusaha masuk ke pasar internasional untuk bersaing dan mendukung tujuan nasionalnya.
3. Kepentingan budaya – Penyebaran nilai-nilai demokrasi melalui kerja sama, pemahaman antar masyarakat, serta promosi persahabatan dan pemikiran kosmopolitan guna menciptakan stabilitas politik internasional yang mendukung kemajuan bersama.

Joseph S. Nye mendefinisikan kepentingan nasional sebagai *soft power* yang diterapkan melalui kerja sama antar aktor internasional, dengan tercapainya kepentingan nasional suatu negara maka akan bertambah pula kestabilan diberbagai sistem negara seperti ekonomi, sosial, politik maupun pertahanan dan keamanan (Nye, 2004). Kepentingan akan dianggap sebagai petunjuk dasar dari kebijakan luar negeri yang akan mengarah pada sistem internasional. Keohane dan Nye juga menambahkan pandangannya terkait ekonomi, di mana hubungan internasional yang sebelumnya yang hanya berfokus pada penggunaan kekuatan militer suatu negara saja, namun sekarang lebih digantikan dengan kepentingan negara dalam urgensi ekonomi (Keohane & Nye, 2001).

Konsep Kerja Sama Regional

Penelitian ini menggunakan konsep kerja sama regional sebagai aspek untuk menganalisa lebih spesifik mengenai kepentingan Tiongkok terhadap RCEP pada tahun 2015-2020. Kerja sama regional merupakan bentuk saling ketergantungan yang diatur berdasarkan kedekatan geografis yang berkembang menjadi kepentingan bersama. Helen V. Milner dan Edward D. Mansfield menjelaskan bahwa terdapat dua jenis dalam kerja sama regional, yaitu pertama, berdasarkan faktor kedekatan geografis. Hal ini dipahami sebagai adanya suatu kerja sama dalam berbagai bidang oleh negara-negara yang memiliki kedekatan dalam geografis (Milner & Mansfield, 1999).

Kedua, adalah aktivitas non government. Hal ini dapat dipahami sebagai adanya aktivitas kerja sama dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh non government yang secara letak geografis letaknya berdekatan. Kerja sama regional juga muncul dalam beberapa bentuk yang dapat dibedakan seperti kerja sama regional yang mengarah pada fungsional, politik, serta kebijakan luar negeri dan keamanan.

METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Michael Quinn Patton bahwasanya metode kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan kata-kata sebagai penjabaran dari objek yang diteliti (Patton, 2002). penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pola penggambaran keadaan fakta empiris disertai argumen yang diteliti. Kemudian, menghasilkan suatu uraian yang dilanjutkan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik. Hal ini memberikan gambaran mengenai fenomena dan relevansi masalah yang diteliti dan selanjutnya dianalisis menggunakan teori dan konsep-konsep yang telah disediakan untuk menjawab pertanyaan penelitian khususnya dalam menganalisa penelitian terkait Kepentingan Tiongkok dalam RCEP periode 2015-2020.

Secara garis besar, terdapat dua jenis data yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer merupakan jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti interview atau wawancara, hasil lampiran perjanjian dan lainnya. Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapat melalui tinjauan pustaka seperti buku- buku, jurnal, artikel berita, karya ilmiah, laporan resmi, media elektronik dan sumber lainnya terkait topik yang akan diteliti yaitu,

kepentingan Tiongkok dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) periode 2015-2020.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun setelahnya dalam jangka waktu tertentu. Selama wawancara, peneliti langsung menganalisis jawaban responden. Jika jawaban yang diberikan masih kurang memuaskan, peneliti akan melanjutkan pertanyaan hingga memperoleh data yang dianggap kredibel. Sesuai dengan pandangan Melis dan Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan hingga mencapai kejenuhan data. Proses analisis data mencakup beberapa tahapan, seperti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data, yaitu membandingkan informasi dari berbagai sumber atau metode guna menguji tingkat kepercayaan data yang diperoleh (Moleong, 1991).

PEMBAHASAN

Dalam upaya memenuhi kepentingan ekonominya, Tiongkok berupaya membangun kekuatannya dengan memberikan bantuan dan kerja sama untuk mendukung pengembangan ekonomi serta dapat memenuhi kepentingan utamanya dalam meningkatkan hubungan dan memperluas ekonomi politik Tiongkok. Kerja sama di dalamnya dinilai cukup beragam baik bilateral, regional maupun multilateral. Tiongkok selalu memprioritaskan kepentingan ekonominya. Komitmen tersebut telah ada disaat Tiongkok mulai membuka diri pada 1970-an, memperlihatkan bahwa Tiongkok menempatkan kepentingan ekonomi sebagai prioritas secara konsisten dan permanen atau dapat disebut sebagai kepentingan jangka panjang (Trisnawati, 2019).

Ekonomi Tiongkok Dalam Sistem Internasional

Perkembangan ekonomi Tiongkok diawali pada era Deng Xiaoping yang merupakan awal reformasi Tiongkok 1970-an, bahwasanya dunia internasional berada dalam tatanan multipolar yang membawa kepada perdamaian dan pembangunan suatu negara. Di mana di masa kepemimpinannya menjadi awal untuk Tiongkok mulai membuka diri dengan dunia luar dan mulai membuka jalan bagi investasi asing untuk datang ke Tiongkok (Jiang & Yu, *Understanding RCEP and CPTPP : From the Perspective Tiongkok's Dual Circulation Economic Strategy*, 2021). Dengan keterbukaan tersebut Tiongkok semakin menjurus pada tujuan kebijakan ekonomi politik internasional Tiongkok yang ekspansif dan hegemoni. Era berikutnya ditahun 2001, bergabungnya

Tiongkok ke dalam World Trade Organization (WTO) yang merupakan titik balik utama dalam liberalisasi ekonomi, dengan meningkatkan akses pasar internasional (Fadli, 2017).

Hu Jintao mewujudkan tujuan ini dengan merencanakan kebijakan *The Peaceful Rise of China*, yakni kebangkitan Tiongkok yang damai, pada 22 Desember 2005 dalam dokumen *China Peaceful Development Road* (yang dikenal dengan istilah *heping fazhan* dalam bahasa Mandarin). Pada masa kepemimpinan Hu Jintao, GDP Tiongkok semakin meningkat dari USD 1,46 triliun pada tahun 2002 menjadi USD 7,74 triliun di tahun 2012, hal ini menjadi penanda peningkatan GDP Tiongkok dalam 10 tahun dengan total peningkatan hampir mencapai lima kali lipat pada tahun-tahun sebelumnya (Wishanti, 2021).

Perkembangan ekonomi Tiongkok semakin meningkat di masa kepemimpinan Xi Jinping, Menurut departemen perdagangan Tiongkok atau *China's Ministry of Commerce* (MOFCOM) pada 2014 Tiongkok telah menjalin kerja sama dan perjanjian perdagangan dengan 33 mitra (Isan, 2017). Tiongkok menjalin kerja sama FTA dengan beberapa negara seperti ASEAN, Hong Kong, Macau, Chili, Pakistan, Selandia Baru, Singapura, Peru, Kosta Rika, Taiwan, Swiss, Islandia, dan Australia. Selain itu, terdapat beberapa kesepakatan FTA yang masih dalam tahap negosiasi seperti Norwegia, *Gulf Cooperation Council* (GCC), Korea Selatan dan perjanjian trilateral antara Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Pada kebijakan *Made in China 2025*, juga merupakan upaya pencapaian kepentingan ekonomi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi global, serta berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat Tiongkok terhadap teknologi asing.

Pada 2019, Tiongkok terus memperluas jaringan kerja samanya melalui berbagai negosiasi dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara lain. Beberapa di antaranya termasuk FTA dengan Korea Selatan (2015), Georgia (2016), Maladewa (2017), dan Mauritius (2019). Selain itu, masih dalam tahap negosiasi, Tiongkok juga menjalin kesepakatan dengan Sri Lanka, Israel, Moldova, Panama, dan Palestina (China, 2017). Pada 2020, Tiongkok meresmikan perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP), yang mencakup hampir 30% populasi dunia. Kesepakatan ini bertujuan memperkuat perdagangan internasional dengan mengadopsi standar tinggi, meningkatkan kualitas perdagangan, dan mendukung liberalisasi dalam kerja sama ekonomi kawasan.

Untuk menegaskan kepentingan ekonominya, Tiongkok mendirikan proyek *One Belt One Road* (OBOR) kemudian menjadi *Belt and Road Initiative* (BRI), meluncurkan

kampanye Made in China 2021, *Intellectual Property Rights* (IPR Protection) dan lainnya. Pada 2019, BRI telah mencakup lebih dari 120 negara dan 30 institusi, serta melibatkan investasi terkait di hampir 80 negara. Negara-negara BRI mewakili lebih dari 60% populasi dunia, menyumbang 70% dari cadangan energi global dan sekitar sepertiga dari GDP perdagangan global. Selama bertahun-tahun, jangkauan proyek telah meluas ke berbagai wilayah seperti Oseania, Asia Barat, Selatan dan Tengah, Eropa Timur dan Barat, Afrika, dan Amerika Latin (Yilmaz & Li, 2020).

Latar Belakang Pembentukan RCEP

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan sebuah perjanjian perdagangan regional antara sepuluh negara ASEAN dan enam dari masing-masing negara mitra FTA yaitu Australia, India, Jepang, Tiongkok, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Berdasarkan kesepakatan yang ada di tiap negara, perjanjian ini resmi ditandatangani pada 15 November 2020.

Pada 1997 menjadi titik pertama dalam krisis keuangan Asia sehingga melemahkan kemampuan ASEAN untuk menarik investasi dan modal hasil dalam memperluas pasar ekspornya. Perubahan struktural pasca krisis menjadikan ASEAN memerlukan pendalaman kerja sama ekonomi intra ASEAN yaitu dalam membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menggantikan *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA) pada 2003 (Lahulima, 2013). Keberhasilan ASEAN dalam membangun FTA memperlihatkan sikap sentralitas ASEAN sebagai salah satu motivasi utama untuk mengusulkan RCEP. Pada Agustus 2012 para menteri perekonomian mengesahkan prinsip paduan dan tujuan perundingan RCEP. Pada November 2012, tepatnya pada KTT ASEAN ke-21 di Phnom Penh Kamboja, para kepala negara ASEAN dan keenam Mitra FTA-nya mengumumkan bahwa 10 negara ASEAN dan enam mitra FTA-nya akan memulai perundingan RCEP pada tahun 2013, *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership* sebagai acuan dalam perundingan (Gultom, 2020).

Perundingan pertama diawali pada Mei 2013 di Brunei Darussalam dan berlangsung hingga tujuh tahun kedepan dengan total 10 putaran perundingan yang berakhir di tahun 2020. Setelah penandatanganan berlangsung, sekretariat ASEAN telah menerima pengesahan dari enam negara ASEAN yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Singapura, dan Vietnam dengan empat mitra yaitu Australia, Tiongkok, Jepang, dan Selandia Baru. Sesuai perjanjian, RCEP berlaku 60 hari setelah terpenuhinya jumlah minimum IOR/A, dengan ratifikasi disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN. Perjanjian

ini mulai berlaku pada 1 Januari 2022, diikuti Korea Selatan pada 1 Februari 2022.

Setelah negosiasi RCEP berlangsung, dengan populasi hampir dari 30% populasi dunia, menjadikan kerja sama RCEP memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota mencapai 5,2% dari 2015-2019 yang merupakan kerja sama yang memiliki pertumbuhan ekonomi negara anggota terbesar di dunia. Kemudian disusul oleh *The United State-Mexico-Canda* (USMCA) dengan 2,59%, Uni Eropa 2,3% dan terakhir CPTPP dengan 2,2% rata-rata pertumbuhan ekonomi negara anggota (China Briefing, 2021).

Kepentingan Tiongkok dalam Melakukan Kerja Sama RCEP

Menurut Burchill terdapat beberapa aspek di dalam kepentingan nasional yaitu politik, ekonomi dan budaya (Burchill, 2005). Di antara ketiga aspek tersebut dua di antaranya menjadi indikator untuk menganalisis terkait kepentingan politik dan ekonomi Tiongkok dalam kerja sama RCEP periode 2015-2020.

1. Aspek Politik

Sistem ekonomi politik Asia Pasifik berada dalam persimpangan setelah terdapat perundingan perdagangan bebas. Hal ini diawali pada pembentukan TPP dan kemudian disusul oleh RCEP. TPP merupakan FTA yang dipimpin oleh AS guna untuk meningkatkan hubungan kawasan ekonomi di tiap negara anggota dan mendorong liberalisasi negara-negara di kawasan Asia Pasifik. Tiongkok melihat RCEP sebagai peluang untuk dapat menyaingi posisi AS di kawasan Asia Pasifik dengan secara jelas menyatakan keterlibatan penuh untuk segera menyelesaikan rencana RCEP di tahun 2015. Pada 2017 AS menyatakan untuk menarik diri dari kerja sama TPP.

Hal tersebut jelas menjadi sarana alternatif Tiongkok untuk memperoleh keuntungan dalam ekonomi politik serta memperkuat pengaruhnya di kawasan tanpa harus mereformasi kebijakan perlindungan yang lebih kuat untuk melawan AS. Secara tidak langsung, keberhasilan RCEP mengangkat Tiongkok sebagai pesaing utama AS lebih dekat dengan beberapa sekutu regional paling setia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia, di samping mitra strategisnya seperti Indonesia, Singapura, dan Vietnam. Dengan pengaruh Tiongkok yang semakin besar dan keterlibatannya dalam kerja sama RCEP akan menyakinkan negara-negara tetangga untuk meningkatkan hubungan di

antaranya. Keterlibatan secara aktif dalam kerja sama menandakan komitmen Tiongkok untuk memelihara perdamaian dan mendorong pertumbuhan kawasan ke dalam orbit ekonomi politik. Hal ini menjadi langkah awal untuk menjalin dan memperbaiki hubungan dengan negara-negara yang sebelumnya dianggap memiliki hubungan kurang baik dengan Tiongkok.

Seperti ketegangan yang terjadi antara Tiongkok dan negara-negara ASEAN yang terlibat konflik terkait Laut Cina Selatan yang telah terjadi pada 1970-an. Hal tersebut menjadi alasan Tiongkok untuk mempertahankan pengaruh dan hubungannya dalam kerja sama RCEP (Pratama, Sosa, & Yulianto, 2022). Melalui RCEP, Tiongkok berupaya untuk menciptakan citra positif dan memperbaiki serta memperkuat hubungannya dengan negara-negara ASEAN dalam menangani isu-isu politik terkait negosiasi kode etik Laut Cina Selatan dengan meluncurkan konsultasi *Code of Conduct* (COC) yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, kemudian negosiasi ini masih berlangsung hingga 2020.

Dengan kompleksitas konflik tersebut, Tiongkok menjadikan RCEP sebagai suatu wadah untuk menjembatani dan menyelesaikan konflik yang terjadi di Asia Timur yang mengarah kepada peningkatan hubungan dan perubahan kondisi ekonomi politik ke arah yang lebih baik bagi kawasan Asia Timur. Salah satunya yaitu memperbaiki hubungannya dengan Jepang dikarenakan sebelumnya Jepang dianggap sebagai lawan dari Tiongkok. Akibat permasalahan di antara keduanya menciptakan kondisi hubungan yang kurang baik. Permusuhan ini sudah berakar bahkan pada masa perang Sino-Japan, kemudian terjadi perebutan atau sengketa wilayah terkait Laut Cina Timur atau Kepulauan Senkaku/Diaoyu dan ditambah lagi dengan ketergantungan Jepang terhadap AS. Oleh sebab itu, hubungan antara Tiongkok dan Jepang adalah salah satu hubungan bilateral paling kompleks di dunia. Meskipun bersaing dan bentrok satu sama lain dalam berbagai kepentingan yang tumpang tindih dan ketidakpercayaan yang meluas, ekonomi politik mereka terintegrasi dengan baik dan perdagangan bilateral terus meningkat.

Pada tahun 2017, Presiden Xi Jinping dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe kembali untuk sepakat dalam meningkatkan pertukaran bilateral untuk mendorong dan kembali memperkuat hubungan ekonomi politik di kedua negara. melalui RCEP kedua negara berupaya untuk memperbaiki hubungan mengingat bahwa keduanya merupakan lingkup kawasan Asia Timur yang secara geopolitik dan geosentris

memberikan pengaruh besar terhadap hubungan dan kepentingan mereka bahkan kedua negara harus segera memperbaiki hubungan untuk keamanan, stabilitas dan kemakmuran Asia Timur.

2. Aspek Ekonomi

Sejatinya, Tiongkok sudah menjadi mitra dagang utama bagi sebagian besar ekonomi Asia, sehingga memberikan pengaruh yang besar akan tumbuhnya kerja sama RCEP. RCEP dianggap sebagai penghubung antara Tiongkok dengan lawan regionalnya seperti Jepang dan kemudian mulai memperbaiki hubungan melalui RCEP. Tak berhenti sampai disitu, Tiongkok dan Jepang juga akan berupaya untuk membangun FTA yang disebut FTA China-Japan “*de-facto*” yang selanjutnya akan memperkuat hubungan ekonomi antara dua pasar terbesar Asia melalui kombinasi tenaga kerja yang lebih murah dan pengetahuan teknologi tinggi.

Hal ini menjadi keuntungan bagi Tiongkok yang ingin memperkuat hubungan untuk menciptakan akses pasar yang semakin luas. Beberapa hasil kebijakan dari FTA RCEP antara Jepang dan Tiongkok melahirkan kebijakan pemotongan tarif dari Tiongkok menjadi nol ke 88% barang dari Jepang. Sedangkan Jepang akan memangkas tarif menjadi nol pada 88% barang-barang dari Tiongkok. Melalui RCEP kebijakan ini akan menghapus produk impor antar kedua negara secara bertahap selama 20 tahun. Hubungan di antara keduanya semakin meluas bahkan bergabungnya Tiongkok ke RCEP memperluas pasar baru dengan Jepang. Tidak hanya dengan Jepang, Tiongkok secara kompleks juga semakin memperkuat hubungan dan perluasan akses pasarnya di kawasan Asia Timur.

Melalui proses negosiasi RCEP tahun 2015, mempertemukan Korea Selatan, Jepang dan Tiongkok sehingga sepakat untuk memperbaiki hubungan dan meningkatkan kerja sama bahkan mengangkat kembali hubungan trilateral yaitu *China-Japan-Republic of Korea Free Trade Agreement* (CJK FTA). Ketiga negara menegaskan akan mempercepat negosiasi untuk menandatangani perjanjian perdagangan serta dapat mendorong kerja sama ekonomi perdagangan yang lebih kuat. Menurut Wang Shouwen, Wakil Menteri Perdagangan Tiongkok, RCEP akan menghapus tarif hampir 30% dari ekspor Tiongkok. Sebelum negosiasi RCEP, Tiongkok telah mencapai kesepakatan perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara RCEP.

Namun, dengan diberlakukannya RCEP, Tiongkok mendapatkan keuntungan lebih dari perjanjian tersebut. Selain itu, sebagai perjanjian perdagangan bebas (FTA) pertama antara Tiongkok dan Jepang, RCEP akan membuka jalan bagi Tiongkok dan Jepang untuk

saling diuntungkan dari tarif yang lebih rendah untuk mesin, teknologi informasi elektronik, produk kimia, dan barang lainnya. Dari sisi impor, Tiongkok akan mendapat manfaat dari impor yang lebih murah untuk teknologi canggih, peralatan utama, suku cadang dan komponen utama, barang konsumsi, farmasi, dan peralatan medis, serta layanan produksi, seperti desain, penelitian dan pengembangan, konservasi energi dan perlindungan lingkungan, untuk lebih memenuhi kebutuhan pasar domestik akan barang dan jasa berkualitas tinggi.

Dengan keterlibatan Tiongkok di RCEP, memberikan manfaat di mana RCEP akan menambah PDB Tiongkok secara bertahap, walaupun itu tidak akan cukup untuk membatalkan kerusakan perang dagang dengan AS. Namun, selama negosiasi berlangsung RCEP akan menambah 0,4 % pendapatan riil Tiongkok pada tahun 2030, sementara perangedagang akan memangkas 1,1 %, jika permusuhan saat ini berlanjut. Ini akan membuat Tiongkok jauh lebih terintegrasi dengan negara-negara Asia lainnya (Bermingham & Tang, 2020).

Kerja Sama Regional Tiongkok dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) merupakan kerja sama ekonomi dalam kawasan Asia Pasifik, di mana Asia Pasifik merupakan suatu kawasan yang memiliki jalur strategis dalam perdagangan. Dalam kawasan tersebut RCEP menghadirkan potensi kuat untuk membentuk pola perdagangan dan investasi regional dengan baik ke masa depan serta mempengaruhi arah kerja sama ekonomi global. Efek RCEP pada perdagangan kawasan juga akan secara signifikan memperdalam jaringan produksi regional dan meningkatkan produktivitas di tiap negara.

Dalam implementasinya, RCEP berpotensi untuk melakukan kerja sama positif dan berjangka panjang. RCEP sendiri telah memiliki aturan dan kebijakan khusus dalam pelaksanaan kerja sama untuk kedepannya. Salah satunya yaitu dalam menghilangkan hambatan tarif dan non tarif antara negara-negara RCEP dengan lebih dari 90% perdagangan barang menerima perlakuan tarif nol persen. Bahkan diperkirakan pada 2030, jika implementasi berjalan sesuai rencana, RCEP akan menambahkan USD 209 miliar per tahun untuk pendapatan dunia dan USD 500 miliar untuk perdagangan dunia.

Serta akan meningkatkan pendapatan anggota sebesar 0,6%, dengan menambah USD 245 miliar per tahun untuk pendapatan regional dan 2,8 juta untuk pekerjaan regional. Dengan perkiraan tersebut menjadi dasar bahwa kerja sama ini akan membuat negara

anggotanya semakin berkembang untuk masa depan. Melalui RCEP, Tiongkok melihat bahwa kerja sama ini memiliki arti penting dan cukup besar untuk memenuhi kepentingan nasional. Di mana, integrasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik akan memberikan pengaruh yang luar biasa bagi negara anggota khususnya Tiongkok. RCEP akan membantu membantu Tiongkok untuk mengintegrasikan kawasan dan membawa negara-negara kawasan lebih dekat ke orbit ekonominya.

Hal ini membuat negara-negara kawasan semakin tertarik dengan kemajuan ekonomi Tiongkok, sehingga membuat mereka semakin bergantung pada ekonomi Tiongkok sendiri. RCEP memiliki empat kunci utama dalam merealisasikan tujuannya yaitu untuk membangun kemitraan ekonomi yang modern, komprehensif, berkualitas tinggi dan saling menguntungkan yang akan memfasilitasi perluasan perdagangan, investasi regional serta memberikan kontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global (RCEP, 2022).

- a. Modern, yaitu perjanjian yang tidak hanya dibuat untuk hari ini akan tetapi juga berlangsung untuk kedepan. Ini memperbarui cakupan FTA ASEAN Plus One yang ada (FTA ASEAN dengan lima mitra dialog) dan mempertimbangkan realitas dan perubahan yang muncul khususnya pada perdagangan elektronik, potensi usaha mikro, kecil dan menengah, pendalaman regional rantai nilai dan kompleksitas persaingan pasar. Perjanjian ini dibangun di atas perjanjian organisasi perdagangan dunia (WTO) sesuai dengan kesepatan dan ketentuan yang ada.
- b. Komprehensif, perjanjian ini dilihat dari segi cakupan maupun kedalaman komitmen. Cakupannya terdiri dari 20 bab perjanjian dan mencakup banyak bidang yang sebelumnya belum ada pada FTA ASEAN Plus One lainnya.
- c. Kualitas tinggi, yang mana perjanjian ini berisikan ketentuan- ketentuan melebihi dari FTA ASEAN plus one yang ada, dengan tetap mengakui tingkat perkembangan dan kebutuhan masing-masing negara anggota. Perjanjian ini membahas isu-isu yang diperlukan untuk mendukung keterlibatan para pihak dalam rantai pasokan global dan regional serta akses pasar. Perjanjian ini juga berusaha untuk meningkatkan persaingan dan dapat membantu memfasilitasi pengembangan dan perluasan rantai pasokan regional bagi negara anggota.
- d. Saling menguntungkan, kerangka perjanjian RCEP memberikan keuntungan untuk

memfasilitasi perluasan perdagangan dan investasi serta kontribusi dan pembangunan ekonomi global dengan mempertimbangkan perkembangan dan kebutuhan ekonomi bagi negara anggota.

Keberhasilan RCEP Ini menunjukkan bahwa kebijakan kawasan berpusat pada ekonomi dan terbuka untuk integrasi ekonomi dengan sedikit kecenderungan untuk menjadi tempat strategis bagi kekuatan besar seperti Tiongkok. Namun, demikian, ekonomi negara-negara Asia Pasifik ke Tiongkok adalah untuk memaksimalkan potensi ekonomi dan kepentingan perdagangan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama RCEP memberikan manfaat signifikan bagi Tiongkok dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Secara politik, Tiongkok berusaha meningkatkan pengaruhnya di Asia Pasifik serta memperbaiki hubungan dengan negara anggota, terutama Jepang dan ASEAN, demi membangun citra positif dan memperluas kerja sama. Dari segi ekonomi, RCEP membuka peluang bagi Tiongkok untuk memperluas akses pasar, termasuk membentuk FTA *de facto* dengan Jepang serta menghidupkan kembali FTA trilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, Tiongkok akan menerima rata-rata 25% barang impor mereka negara anggota RCEP. Selain itu, Tiongkok berupaya mengurangi kecurigaan geopolitik dengan meningkatkan impor dari negara anggota RCEP dan mengembangkan pasar domestik. Hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan industri, termasuk pertambangan dan ekspor, dengan proyeksi peningkatan total ekspor sebesar USD 248 miliar.

Dengan demikian, keputusan Tiongkok bergabung dalam RCEP merupakan langkah strategis untuk memperkuat hubungan politik dan ekonomi, meningkatkan stabilitas perdagangan, serta mendorong pertumbuhan dan kemakmuran ekonominya di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. New York: Palgrave Macmillan.
- Keohane, R. O., & Nye, J. (2001). *Power and Interdependence*. New York: Longman.
- Lahulima, C. P. (2013). *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar.

Milner, H. V., & Mansfield, E. D. (1999). The New Wave of Regionalism. *International Organization*, 101.

Moleong, L. J. (1991). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Risdakarya.

Nye, J. S. (2004). *Soft Power the Means to Success in World Politics*. New York: Public Affairs.

Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. London: Sage Publication.

Wishanti, D. A. (2021). Kebangkitan China dalam Kerja sama Ekonomi Internasional di Kawasan Asia Timur. *Universitas Brawijaya*, 21.

JURNAL

Fadli, M. Y. (2017). *Regional Comprehensive Economic Partnership dan Pergeseran Respon China dalam Kaitannya*. Surabaya: Repository Unair.

Gultom, D. (2020). Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) : Peluangnya bagi Indonesia dan langkah Pemanfaatannya sebuah perspektif internal. *Ringkasan Kebijakan No. 6 Center for Indonesia Policy Studies*, 3

Isan, R. A. (2017). Kepentingan Republik Rakyat Tiongkok Dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *JOM FISIP Volume. 4 No. 1*, 10 - 11.

Jiang, H., & Yu, M. (2021). Understanding RCEP and CPTPP : From the Perspective Tiongkok's Dual Circulation Economic Strategy. *China Economic Journal*, 145-148.

Park, S. (2017). Can trade help overcome economic crisis? Implications for Northeast Asia Creating a regional FTA between Kore, Tiongkok and Japan and mega FTAs such as RCEP and TPP. *International Organisation Research Journal Volume 2, No. 12*, 104 - 105.

Petri, P. A., & Plummer, M. G. (2020, June 03). *Trade War, RCEP and CPTPP : Will East Asia Decouple From The United State?* Retrieved from papers.ssm.com: https://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3630294

Pratama, M. F., Sosa, P. I., & Yulianto, T. (2022). Motif dan Kepentingan Tiongkok dalam Pembentukan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) . *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Volume. 6, No. 1*, 1839.

Ragimun. (2018). Kerja sama Perdagangan Barang Pada Forum RCEP Bagi Indonesia.

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol 9, No. 1, 68

- Trisnawati, A. F. (2019). Kepentingan Ekonomi Dibalik Respon Pemerintah Cina Terhadap United State Trade Representative (USTR) Notorious Markets List Tahun 2016–2018. *Journal of International Relations Volume 5, No. 4*, 619-620.
- Yilmaz, S., & Li, B. (2020). The BRI-Led Globalization and Its Implications for East Asian Regionalization. *Chinese Political Science Review*, 8
- Yudono, R. M., Dwi A, W. R., & Setiawan, M. A. (2020). Respon ASEAN Terhadap Mundurnya India dari Kerja sama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Volume 3, No 2*, 185.

INTERNET

- ASEAN. (2022). *RCEP Agreement enter into force* . Jakarta: <https://asean.org/rcep-agreement-enters-into-force/>.
- Bermingham, F., & Tang, F. (2020, November 16). *China's marginal RCEP gains will not offset trade war impact on economy, studies show*. Retrieved from South China Morning Post, US-China Relation: <https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3110022/chinas-marginal-rcep-gains-will-not-offset-trade-war-impact>
- CGTN. (2020, December 8). *After RCEP, will the South China Sea COC gain momentum in upcoming ASEAN meetings?* Retrieved from news.cgtn.com: <https://news.cgtn.com/news/2020-12-08/After-RCEP-will-South-China-Sea-COC-gain-momentum-in-ASEAN-meetings--VQucMuA7K0/index.html>
- China Briefing. (2021, November 5). *Trading Opportunities Available Under the RCEP*. Retrieved from China-Briefing.com: <https://www.china-briefing.com/news/rcep-trading-opportunities-available-plurilateral-fta-beneficial-provisions/>
- China, M. o. (2017). *China FTA Network*. Shanghai: Ministry of Commerce People's Republic of China. Retrieved from <http://fta.mofcom.gov.cn/topic/engeorgia.shtml>
- CRS Report. (2019). *China's Economic Rise: History, Trends, Challenges, and Implications for the United State*. shanghai: Congressional Research Service
- RCEP. (2022, July). *Summary of the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement*. Retrieved from RCEP Official Document : <https://rcepsec.org/wp-content/uploads/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf>